

**PENGARUH BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG JASA, BELANJA MODAL  
DAN JUMLAH ASET TETAP DAERAH TERHADAP KEMAMPUAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2008 - 2013**

**Septa Efrieni Putri**  
Universitas Sriwijaya  
septae\_putri@gmail.com

***ABSTRACT***

*Regional Autonomy aims to realize the independence of regional development in all aspects of life. Through autonomy, all regions in Indonesia are expected to be able to carry out all government affairs and development by relying on local own revenue (PAD). The main characteristic that embodies an autonomous region capable of berotonom lies in the financial capacity of the region. This means that the autonomous regions must have the authority and ability to explore their own financial resources to manage and use sufficient finances to finance the implementation of local government. This study aims to determine the effect of personnel expenditure, goods and services expenditure, capital expenditures and total fixed assets of the district to the financial capacity of municipal districts in the province of South Sumatra, amounting to 15 districts of the city period 2008-2013. The data used in this research is panel data that is quantitative. Further data in the analysis with Random Effects method with the help of data processing software evIEWS version 6. The results of this study conclude that personnel expenditure, goods and services expenditure, capital expenditures and total fixed assets area together significantly influence the financial capacity of the region. Employee expenditure variable and service spending variable partially have a significant influence with positive coefficient direction, while variable of fixed asset area partially have significant effect with negative coefficient direction, while capital expenditure variable have no significant effect to to local financial ability.*

**Keywords :** *Local Financial Capacity, Employee Expenditures, Goods and Services Expenditure, Capital Expenditures, Total Permanent Property Assets, Regency Town in South Sumatera.*

**PENDAHULUAN**

Pelaksanaan desentralisasi keuangan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004. Kedua undang-undang di bidang otonomi daerah tersebut telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk menggali potensi daerahnya dan menetapkan prioritas pembangunan.

Tujuan otonomi daerah menurut penjelasan Undang-undang No 32 tahun 2004 adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Otonomi daerah yang di laksanakan diharapkan akan memberikan manfaat yang besar terhadap daerah. Diantara manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut. *Pertama*, meningkatnya efisiensi dan efektifitas administrasi pemerintahan dan pembangunan di daerah. *Kedua*, terciptanya hubungan yang harmonis dan saling membutuhkan antara pemerintahan dengan masyarakat. *Ketiga*, mempertinggi daya serap aspirasi masyarakat dalam program pembangunan. *Keempat*, terwujudnya penanganan masalah secara terpusat dan tepat dari berbagai permasalahan aktual yang berkembang dalam masyarakat. *Kelima*, mendorong munculnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan di daerah ( Ahmad Jamil, 1998).

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah tidak lepas dari kesiapan masing-masing daerah dalam hal pendanaan, maupun sumberdaya manusianya. Kemampuan keuangan suatu daerah diukur melalui seberapa besar peranan atau kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai seluruh pengeluaran daerah, termasuk belanja rutin daerah. Semakin besar kontribusi PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka semakin besar tingkat kemandirian suatu daerah sehingga semakin kecil ketergantungan daerah untuk

mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali dan mengembangkan seluruh sumber-sumber keuangan daerah sendiri berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki.

Pada dasarnya pendapatan asli daerah tidak lepas kaitannya dari peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat atau yang biasa dikenal dengan pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan wujud peningkatan kinerja pemerintah daerah. Adanya peningkatan kualitas layanan publik akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Dengan demikian akan semakin tinggi pula peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Peningkatan dalam pelayanan pemerintah akan menunjang peningkatan penerimaan pemerintah dalam bentuk pajak dan retribusi yang dibayarkan masyarakat.

Halim (2012) menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah dapat ditinjau dari sisi pemerintahan dan dari sisi pengelolaan keuangan daerah. Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, kinerja pemerintah daerah antara lain diukur dalam hal :

1. Kemandirian keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Tingkat efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Tingkat aktifitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Pertumbuhan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu.

Selanjutnya Halim (2012) menyatakan bahwa untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah melalui analisis rasio keuangan daerah tersebut. Kemandirian keuangan daerah diukur melalui rasio kemandirian

keuangan daerah. Tingkat efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah diukur melalui rasio efektifitas dan efisiensi. Tingkat aktifitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatannya diukur melalui rasio aktifitas. Pertumbuhan pendapatan dan belanja selama periode waktu tertentu diukur melalui rasio pertumbuhan.

Berdasarkan data laporan keuangan kabupaten kota di provinsi Sumatera Selatan periode 2008-2013 diperoleh nilai rasio kemandirian, rasio efektifitas dan rasio efisiensi, rasio aktifitas dan rasio pertumbuhan dalam persentase sebagaimana tabel 1.

**Tabel 1**  
**Persentase Rata-rata Kemandirian Daerah Pemerintah Kabupaten Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008 s/d 2013**

Tahun	Rata-rata Kemandirian Daerah
2008	3,9
2009	4,7
2010	4,5
2011	5,5
2012	6,3
2013	7,7

Sumber : diolah dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008-2013 dan laporan realisasi APBD tahun 2008 – 2013 Kabupaten Kota di Indonesia, webside : djpk.depkeu.go.id

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa tingkat kemandirian rata-rata kabupaten kota di Sumatera Selatan periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 kurang

dari 10% yang berarti persentase pendapatan asli daerah kurang dari 10% dari seluruh pendapatan.

**Tabel 2**  
**Klasifikasi Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian
--------------------	-------------------

<b>Rendah Sekali</b>	0 - 25
<b>Rendah</b>	25 - 50
<b>Sedang</b>	50 - 75
<b>Tinggi</b>	75 - 100

Sumber : Halim (2012).

Rasio kemandirian menggambarkan jumlah pendapatan asli daerah dibandingkan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan

demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang

merupakan komponen utama pendapatan asli daerah (Halim, 2012).

Undang-undang NO.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa sumber penerimaan daerah dikelompokkan menjadi: (i) Pendapatan Asli Daerah (ii) Dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, (iii) Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Menurut pasal 6 undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah berasal dari (1) Pajak daerah, (2) Retribusi daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam periode enam tahun (2008 s/d 2013) terjadi peningkatan kemandirian keuangan pemerintah kabupaten kota di provinsi Sumatera Selatan. Tetapi peningkatan tersebut tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Kemampuan keuangan masih sangat rendah belum mencapai 25%. Bahkan pada tahun 2010 terjadi penurunan tingkat kemandirian keuangan dibandingkan tahun 2009. Di antara kabupaten/kota tersebut, kota Palembang menunjukkan rasio kemandirian yang paling tinggi yaitu sebesar 18,9% pada tahun 2011, 23,3% pada tahun 2012 dan 27,5% pada tahun 2013 sementara kabupaten kota lainnya memiliki rasio kurang dari 10%.

**Tabel 3**  
**Persentase Rata-rata Efektifitas Pengelolaan Keuangan**  
**Pemerintah Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan**  
**Tahun Anggaran 2008 s/d 2013**

<b>Tahun</b>	<b>Rata-rata persentase</b>
<b>2008</b>	<b>98,7</b>
<b>2009</b>	<b>91,8</b>
<b>2010</b>	<b>87,9</b>
<b>2011</b>	<b>126,9</b>
<b>2012</b>	<b>118,5</b>
<b>2013</b>	<b>105,7</b>

Sumber : diolah dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008-2013 dan laporan realisasi APBD tahun 2008 – 2013 Kabupaten Kota di Indonesia, webside : djpk.depkeu.go.id

Menurut Halim (2012), kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal minimal 100%. Pada tabel 1.3 tampak rasio efektifitas pengelolaan keuangan

pemerintah Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan periode 2008-2013 mendekati 100% bahkan sejak tahun 2011 memiliki rasio melebihi 100%. Hal ini menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

**Tabel 4**  
**Persentase Rata-rata Efisiensi Pengelolaan Keuangan**  
**Pemerintah Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan**  
**Tahun Anggaran 2008 s/d 2013**

<b>Tahun</b>	<b>Rata-rata Persentase</b>
--------------	-----------------------------

2008	14,3
2009	12,6
2010	12,6
2011	9,9
2012	8,5
2013	8,2

Sumber : diolah dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008-2013 dan laporan realisasi APBD tahun 2008 – 2013 Kabupaten Kota di Indonesia, webside : djpk.depkeu.go.id

Sementara rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya operasional yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien bila rasio yang dicapai kurang dari 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Pada tabel 4 terlihat kecenderungan rasio efisiensi yang semakin menurun. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah kabupaten kota di Provinsi Sumatera

Selatan dalam mengelola keuangannya semakin efisien.

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa rasio aktivitas belanja rutin yaitu belanja pegawai dan belanja barang jasa kurang dari 70% hanya pada tahun 2010 melebihi 70%. Hal ini berarti sekitar 30% lainnya merupakan belanja pembangunan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 6. Rasio belanja pembangunan sekitar 30% ini dikatakan baik karena menunjukkan pemerintah kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan telah menyiapkan dana bagi pembangunan daerahnya melalui belanja pembangunan atau belanja modal.

**Tabel 5**  
**Persentase Rata-rata Aktivitas Belanja Rutin**  
**Pemerintah Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan**  
**Tahun Anggaran 2008 s/d 2013**

Tahun	Rata-rata Persentase
2008	65,9
2009	67,5
2010	72,9
2011	69,8
2012	67,9
2013	66,4

Sumber : diolah dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008-2013 dan laporan realisasi APBD tahun 2008 – 2013 Kabupaten Kota di Indonesia, webside : djpk.depkeu.go.id

**Tabel 6**  
**Persentase Rata-rata Aktivitas Belanja Pembangunan**  
**Pemerintah Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan**

**Tahun Anggaran 2008 s/d 2013**

<b>Tahun</b>	<b>Rata-rata Persentase</b>
<b>2008</b>	<b>34,1</b>
<b>2009</b>	<b>32,5</b>
<b>2010</b>	<b>27,1</b>
<b>2011</b>	<b>30,2</b>
<b>2012</b>	<b>32,1</b>
<b>2013</b>	<b>33,6</b>

Sumber : diolah dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008-2013 dan laporan realisasi APBD tahun 2008 – 2013 Kabupaten Kota di Indonesia, webside : djpk.depkeu.go.id

**Tabel 7**  
**Persentase Rata-rata Pertumbuhan PAD, Total Pendapatan Belanja Rutin dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008 s/d 2013**

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>2008/2009</b>	<b>2009/2010</b>	<b>2010/2011</b>	<b>2011/2012</b>	<b>2012/2013</b>
1.	Pertumbuhan PAD.	18,99%	12,55%	64,83%	33,01%	17,60%
2.	Pertumbuhan pendapatan.	8,5%	15,17%	32,69%	15,34%	8,63%
3.	Pertumbuhan Belanja Rutin.	5,11%	12,65%	14,01%	13,44%	13,44%
4.	Pertumbuhan Belanja Pembangunan.	1,61%	13,61%	51,28%	24,95%	21,37%

Sumber : diolah dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008-2013 dan laporan realisasi APBD tahun 2008 – 2013 Kabupaten Kota di Indonesia, webside : djpk.depkeu.go.id

Pada tabel 7 dapat dilihat rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan total pendapatan, pertumbuhan belanja rutin dan pembangunan pada periode 2008 sampai dengan 2013 menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Berdasarkan rasio pengukuran kinerja pengelolaan keuangan sebagaimana tabel 1 sampai dengan tabel 7, dapat dilihat bahwa pemerintah kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan pengelolaan keuangannya secara efektif dan efisien

dengan pertumbuhan pendapatan dan belanja yang positif atau terus mengalami peningkatan. Akan tetapi kinerja pemerintah kabupaten kota Provinsi Sumatera Selatan dalam hal pengelolaan keuangannya belum sepenuhnya dikatakan baik hal ini ditunjukkan dengan tingkat kemandirian keuangan masih berada pada kategori rendah sekali. Untuk itu perlu dilakukan percepatan kemandirian atau kemampuan keuangan kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan.



Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan keuangan pemerintah daerah. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan keuangan pemerintah daerah antara lain : karakteristik daerah yang diukur melalui jumlah aset yang dimiliki daerah sebagaimana penelitian Media Kusumawardani (2012), Mustika Rini dan Fitriasari (2012). Faktor belanja pegawai sebagaimana penelitian Tungki Ariwibowo (2013) dan Erstelita (2015). Faktor belanja barang jasa sebagaimana penelitian Adi (2006), Rizky dan Suryo (2009). Sementara Faktor belanja Modal sebagaimana penelitian Fajar Nugroho (2012), Ika Lusiana (2013), Suhandari Sugiono (2013), dan Erstelita (2015).

Adanya pengaruh belanja daerah dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah juga dapat dijelaskan melalui pendekatan teori agensi. Teori agensi menjelaskan hubungan kontrak kerja antara dua pihak yang memberikan kewenangan atau kekuasaan dalam hal ini masyarakat (disebut *prinsipal*) dan yang menerima kewenangan dalam hal ini legislatif (disebut *agen*) dan hubungan kontrak kerja yang kedua yaitu antara legislatif selaku prinsipal dan Pemerintah Daerah selaku agen. Menurut teori agensi ini kesepakatan bersama dapat dicapai sesuai kontrak kerja bila terdapat suatu usaha atau tindakan yang dapat menyelaraskan tujuan atau keinginan masing-masing pihak. Adanya kebijakan pemerintah daerah dalam hal belanja daerah berupa belanja tidak langsung pegawai serta belanja langsung berupa belanja barang jasa dan belanja modal yang memprioritaskan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan tindakan yang dapat menyelaraskan tujuan *prinsipal* dan tujuan pemerintah daerah sebagai agen dan tentunya dapat meminimalisir masalah keagenan.

Dengan terpenuhinya tujuan masyarakat (*prinsipal*) berupa peningkatan kualitas pelayanan publik maka akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah berupa partisipasi dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah. Peningkatan dalam pendapatan asli daerah ini merupakan indikator adanya peningkatan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Pendekatan teoritik lainnya yang mencuat sebagai upaya penyempurnaan dan perbaikan manajemen birokrasi publik, salah satunya dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler yang disebut mewirauahakan birokrasi (*reinventing government*). Berdasarkan teori ini transformasi mendasar dari sistem dan organisasi publik adalah untuk menciptakan peningkatan dramatis dalam kinerja pemerintah. Menurut teori ini terdapat lima prinsip *reinventing government* diantaranya bahwa jaminan mutu pelayanan dapat diperoleh antara lain dengan memenuhi fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik melalui penggunaan aset tetap milik pemerintah daerah.

Menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai pengaruh faktor belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal dan jumlah aset tetap daerah terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten kota Sumatera Selatan yang diprosikan dengan kemampuan keuangan daerah Pemerintah kabupaten kota Sumatera Selatan.

## LANDASAN TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula

pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut : (Boediono,1999)

- a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
- b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai.
- c. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment.

### **Teori Penerimaan Pemerintah**

Pendapat Peacock dan Wiseman yang mengemukakan adanya peran pemungutan pajak dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah didukung oleh teori Erick Lindahl. Lindahl berpendapat bahwa penyediaan infrastruktur melalui pemungutan Pajak kepada semua masyarakat yang berstatus wajib pajak sesuai dengan kemampuan masyarakatnya. Selanjutnya teori ini menjelaskan bahwa penerimaan pemerintah berasal dari berbagai sumber penerimaan yaitu penerimaan dari sektor pajak, bukan pajak berupa pinjaman pemerintah baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri, penerimaan dari badan usaha milik pemerintah (BUMN) , penerimaan dari lelang, dan sebagainya harus dikelola secara sehat termasuk sistem administrasinya dengan demikian daerah dapat menyusun dan menetapkan APBDnya sendiri secara efektif. Teori penerimaan dan pengeluaran merupakan dasar teori keuangan daerah.

### **Keuangan Daerah**

Menurut Pasal 1, ayat 5 dari PP No. 58/ 2005 menyatakan: “Keuangan daerah secara umum diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

Ruang lingkup keuangan daerah mencakup ( Permendagri No. 13/ 2006, Pasal 2) :

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah, yaitu uang yang masuk ke kas daerah.
4. Pengeluaran daerah, yaitu uang yang keluar dari kas daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah atau kepentingan umum.

Sedangkan menurut Halim (2012), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam Pasal 1 ayat (7) Permendagri nomor 13/ 2006, pengelolaan Keuangan Daerah diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam konteks yang lebih sempit pada dasarnya adalah pengelolaan terhadap APBD yang dilakukan setiap tahun sekali oleh daerah, baik oleh pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/ Kota.



### **Teori Agensi**

Teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan agen. Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agen, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. (Jensen dan Smith, 1984 dalam Halim dan Abdullah 2010).

Menurut teori ini kesepakatan bersama dapat dicapai sesuai kontrak kerja bila terdapat suatu usaha atau tindakan yang dapat menyelaraskan tujuan atau keinginan masing-masing pihak.

### **Kinerja Keuangan Daerah**

Definisi penilaian kinerja menurut Mardiasmo ( 2002 ) ‘‘yaitu penentuan secara priodik efektifvitas oprasional suatu organisasi, bagian organisasi, karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.’’

Sedangkan menurut Mahmudin (2006) ‘‘Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategik planning.

Dalam penelitian ini, istilah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik yang digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja disini menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan (Halim, 2012).

### **Rasio Kemampuan Keuangan Daerah**

Kemampuan keuangan daerah diukur melalui rasio kemandirian keuangan daerah yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Muliana, 2009).

Dalam mengukur tingkat kemandirian daerah ini, (Muliana, 2009) mengukurnya dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah yang diperoleh Daerah dalam Laporan Realisasi APBD.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah Seluruh}}$$

Tujuan kemandirian keuangan daerah mencerminkan suatu bentuk pemerintahan daerah apakah dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Menurut Widodo dalam Halim (2012) Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah.

### **Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah**

Halim (2012) menyatakan Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 100 persen. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

### Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Selanjutnya Halim (2012) menyatakan rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya operasional yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya operasional}}{\text{yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}$$

Realisasi Penerimaan PAD

### Rasio Aktivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

Total APBD.....4).

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

Total APBD.....5).

Rasio Belanja Rutin dikatakan baik apabila tidak melebihi 70% sementara rasio Belanja Pembangunan dikatakan baik apabila tidak kurang dari 30% ( Halim, 2012 ).

### Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik apabila menunjukkan pertumbuhan yang positif ( Halim, 2012 )

### Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

### Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (a) UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut Halim (2007) menyatakan bahwa PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut pasal 6 UU No. 32 tahun 2004 PAD berasal dari: 1) Pajak

daerah, 2) Retribusi daerah, 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### **Konsep Belanja Daerah**

Peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2002 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada pasal 1 (ayat 13) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 pada pasal (huruf q) menyebutkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Halim (2003), belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya. Dan menurut Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diungkapkan pengertian belanja daerah yaitu belanja daerah sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran yang berupa arus aktiva keluar guna melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

### **Karakteristik Belanja Daerah**

Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, pasal

36 bahwa belanja daerah menurut kelompok belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sesuai pasal 37 sampai 39, belanja pegawai pada belanja tidak langsung dipergunakan untuk pengeluaran kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Sementara pada pasal 50 dari Permendagri nomor 13 tahun 2006 dinyatakan bahwa belanja langsung terdiri atas Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal. Belanja Barang Jasa dipergunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah serta belanja untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja pegawai dan pemeliharaan fasilitas sarana prasarana publik. Terdiri atas : Belanja jasa kantor, belanja kursus, pelatihan dan bimtek PNS, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja perawatan kendaraan bermotor, sewa alat berat, sewa sarana mobilitas, perlengkapan peralatan kantor, belanja pemeliharaan gedung dan peralatan. Belanja modal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

### **Aset Tetap Daerah**

Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Aset daerah diperoleh dari dua sumber, yakni dari APBD dan dari luar APBD. Secara singkat, berikut pengertian dan implikasi kedua sumber aset ini:

1. ***Aset yang bersumber dari pelaksanaan APBD dan APBN*** merupakan *output/outcome* dari terealisasinya belanja modal dalam satu tahun anggaran. Permendagri No.13/2006 menyatakan bahwa besaran belanja modal sama dengan besaran penambahan aset di neraca.
2. ***Aset yang bersumber dari luar pelaksanaan APBD***. Dalam hal ini, perolehan aset tidak berasal dari anggaran daerah. Pemda sering menerima aset dari pihak lain, seperti lembaga donor dan masyarakat.

### **Teori *Reinventing Government***

Dalam otonomi daerah salah satu tujuan *Reinventing Government* adalah peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah yang berdampak pada peningkatan pendapatan pemerintah

daerah berupa pendapatan asli daerah. *Reinventing Government* itu sendiri oleh Osborne dan Plastrik (1992) dimaknai sebagai berikut :

*The fundamental transformation of public systems and the organizations to create dramatic increases in their effectiveness, efficiency, adaptability and capability to innovate. This transformation is accomplished by changing their purpose, incentives, accountability, power structure, and culture.*

Transformasi mendasar dari sistem dan organisasi publik adalah untuk menciptakan peningkatan dramatis dalam efektivitas, efisiensi, adaptasi dan kemampuan untuk berinovasi. Transformasi ini dilaksanakan dengan mengubah tujuan mereka, insentif, akuntabilitas, struktur kekuasaan, dan budaya.

Dalam penerapan di negara-negara lain termasuk Indonesia, Osborne dan Plastrik menyatakan bahwa setidaknya terdapat lima strategis yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan yang mendasar dalam rangka mendorong peningkatan kemampuan birokrasi yang efektif dan efisien, ataupun kemampuan menyesuaikan atau adaptasi dan kapasitas untuk memperbaiki sistem dan organisasi publik dengan kata lain untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

*Pertama*, strategi inti (*the core strategy*). Strategi ini menentukan tujuan sebuah sistem dan organisasi publik. Jika sebuah organisasi tidak mempunyai tujuan yang jelas atau mempunyai tujuan yang saling bertentangan, maka organisasi itu tidak dapat mencapai kinerja yang tinggi.

*Kedua*, strategi konsekuensi (*The consequences strategy*). Strategi ini menentukan insentif-insentif yang dibangun ke dalam sistem publik. Pemerintah Daerah memberikan para

pegawainya insentif yang kuat untuk mengikuti peraturan-peraturan dan sekaligus mematuhi. Pada model birokrasi lama, para pegawai atau karyawan memperoleh gaji yang sama terlepas dari yang mereka hasilkan. Namun dalam rangka *reinventing government* mengubah insentif adalah penting dengan cara menciptakan konsekuensi-konsekuensi bagi kinerja. Insentif dan persaingan ini dapat mempunyai bentuk yang beragam, seperti tunjangan kesehatan, kenaikan gaji, atau memberikan penghargaan bagi organisasi-organisasi publik yang mempunyai kinerja yang lebih tinggi.

*Ketiga*, strategi pelanggan (*the customer strategy*). Strategi ini terutama memfokuskan pada pertanggungjawaban (*accountability*). Berbeda dengan birokrasi lama, dalam birokrasi model baru, tanggung jawab para pelaksana birokrasi publik hendaknya ditempatkan pada masyarakat atau dalam konteks ini dianggap sebagai pelanggan. Dengan penyerahan pertanggung jawaban kepada para pelanggan berarti bahwa organisasi-organisasi publik harus mempunyai sasaran yang harus dicapai yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

*Keempat*, *the control strategy*, strategi ini menentukan dimana letak kekuasaan membuat keputusan itu diberikan. Dalam sistem birokrasi lama, sebagian besar tetap berada didekat puncak hierarki. Dalam birokrasi model baru adalah penting mendesentralisasikan pembuatan keputusan kepada pejabat-pejabat dan karyawan atau pegawai birokrasi di bawahnya karena hal ini akan mendorong timbulnya rasa tanggung jawab dikalangan para pegawai birokrasi, dan dalam konteks yang luas mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi kebijakan.

*Kelima culture strategy*. Strategi ini menentukan budaya organisasi publik

yang menyangkut nilai, norma, tingkah laku dan harapan para karyawan. Dengan memiliki tujuan yang sama, adanya sistem insentif, perubahan dalam sistem pertanggung jawaban dan struktur kekuasaan organisasi maka akan mengubah budaya untuk senantiasa berupaya mencapai tingkat kinerja yang tinggi.

### **Penelitian Terdahulu (Studi Empiris)**

Penelitian terdahulu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah antara lain dilakukan oleh Tungki Ariwibowo (2013) yang meneliti pengaruh belanja pemerintah berupa belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian) pada kabupaten kota provinsi Jawa Tengah periode 2010-2013, dengan hasil menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah (rasio kemandirian). Demikian pula penelitian Erstelita (2015) yang menyatakan bahwa belanja pegawai berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten kota provinsi Sumatera Barat dengan arah koefisien negatif.

Penelitian mengenai pengaruh belanja barang jasa terhadap kemampuan keuangan daerah dilakukan oleh Adi (2006) yang menyatakan bahwa adanya hubungan signifikan dengan koefisien positif antara belanja pembangunan daerah dengan peningkatan PAD. Belanja pembangunan tidak hanya ditujukan untuk berbagai infrastruktur industri tetapi juga untuk berbagai infrastruktur jasa yang langsung terkait dengan pemberian pelayanan publik melalui belanja barang jasa. Selanjutnya Rizky dan Suryo (2009) menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan



penelitian yang dilakukan Mustikarini dan Fitriasari (2013) yang menunjukkan belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten kota di Indonesia tahun 2007.

Penelitian mengenai pengaruh belanja modal terhadap kemampuan keuangan daerah dilakukan oleh Ika Lusiana (2013) yang menyatakan belanja modal berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kemandirian keuangan pemda kabupaten/ kota di pulau Jawa pada tahun 2011. Demikian pula penelitian yang dilakukan Suhandari Sugiono (2013) yang menyatakan bahwa secara parsial Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan kabupaten kota di provinsi Jawa Timur. Berbeda dengan penelitian di atas maka penelitian yang dilakukan Erstelita (2015) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten kota di Sumatera Barat tetapi dengan arah negatif.

Media Kusumawardani (2012) meneliti pengaruh *size* (total aktiva), kemakmuran, ukuran legislatif, leverage terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *size* (total aktiva) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah. Demikian pula penelitian yang dilakukan Riswanda dkk (2012) yang meneliti pengaruh total aset dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah provinsi Jawa tengah tahun anggaran 2010/2012 dengan hasil signifikan positif. Sementara Hasil pengujian yang dilakukan oleh Mustikarini, Fitriasari, dll (2012) menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan total aset terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### **Alur Pikir**

Berdasarkan teori agensi dan *reinventing government* maka belanja pegawai yang dimaksudkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pegawai baik PNS maupun non PNS tentunya akan berpengaruh positif terhadap kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerahnya walaupun hal ini berbeda dengan hasil penelitian Tungki Ariwibowo (2013) dan Erstelita (2015) yang menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan. Sementara berdasarkan bukti empiris dari sebagian besar peneliti menunjukkan belanja barang jasa berupa belanja pemeliharaan dan belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah, sebagaimana penelitian Adi (2006), Mustikarini dan Fitriasari (2012) serta Ika Lusiana (2013). Walaupun berbeda dengan penelitian Erstelita (2015) yang menunjukkan pengaruh signifikan tetapi dengan arah negatif. Dalam hal jumlah aset menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah didasarkan penelitian Media Kusumawardani (2012) dan Mustikarini dan Fitriasari (2012).

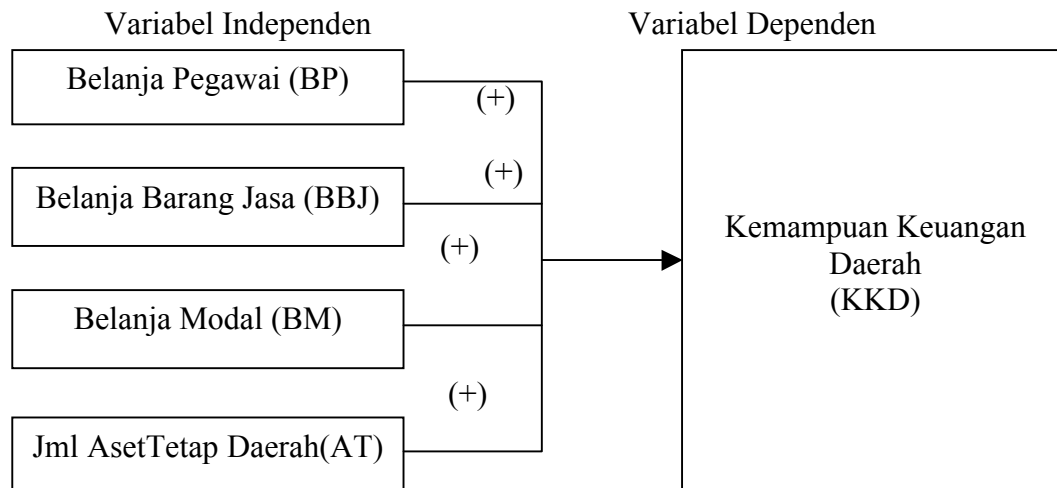
Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai faktor belanja Pemerintah dalam hal ini belanja Pegawai, belanja Barang Jasa dan Belanja Modal dan faktor karakteristik daerah antara lain berupa total aset yang dapat mempengaruhi tingkat kemampuan atau kemandirian keuangan pemerintah daerah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sejenis pada daerah kabupaten kota di Sumatera Selatan yang memiliki kategori tingkat kemampuan atau kemandirian keuangan sangat rendah. Adapun yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya bahwa pada penelitian ini penulis menggabungkan variabel independen belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal yang pada penelitian sebelumnya masing-



masing variabel independen tersebut dilakukan penelitian secara terpisah. Selain itu penulis menambahkan variabel independen berupa aset tetap pemerintah daerah untuk mewakili karakteristik

pemerintah daerah yang pada penelitian sebelumnya berupa total aset. Dengan demikian dapat disusun alur pikir sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.

**Gambar 1**



Alur pikir pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Jumlah Aset Daerah terhadap Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah pada pemerintah kabupaten kota di provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013.

### **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran yang ada, maka penulis menyusun hipotesis sebagai berikut: “Diduga Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Jumlah Aset tetap berpengaruh positif terhadap kemampuan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten kota di provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008-2013.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah kabupaten kota di provinsi Sumatera Selatan dengan ruang lingkup penelitian dibatasi pada pembahasan tentang Belanja daerah yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja pegawai dan pemeliharaan fasilitas sarana prasarana publik. Terdiri atas : Belanja jasa kantor, belanja kursus, pelatihan dan bimtek PNS, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja perawatan kendaraan bermotor, sewa alat berat, sewa sarana mobilitas, perlengkapan dan peralatan kantor, belanja pemeliharaan gedung dan peralatan. Belanja Modal, Jumlah Aset Tetap Pemerintah Daerah serta rasio Tingkat Kemandirian Daerah pemerintah kabupaten kota di Sumatera Selatan yang terjadi pada periode 2008 sampai dengan 2013.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yaitu data berupa angka-angka yang diperoleh dari laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kota di Sumatera Selatan dan sumber lainnya. Angka-angka tersebut akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data.

Sumber Data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data sekunder diperoleh melalui literatur, artikel, jurnal atau situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. (Sugiyono, 2009). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil pencatatan yang sistematis berupa data Panel yang terdiri atas data runtut waktu (*time series*) dari tahun 2008-2013. Dan data *cross section* berupa 15 Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sumber data sekunder berupa data profil kabupaten kota Sumatera Selatan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), *Webside* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia (<http://djpk.go.id>), data mengenai pemerintah Daerah Sumatera Selatan yang diakses melalui situs resmi yaitu [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id) dan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah provinsi Sumatera Selatan berupa laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota di provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2008 s/d 2013 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. Pada laporan tersebut terdapat Neraca yang berisi informasi jumlah Aset Tetap yang dimiliki Pemda, Laporan Realisasi Anggaran yang memuat jumlah PAD, Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal. serta lain-lain yang

terkait dalam penelitian ini. Disamping penggunaan informasi data sekunder, penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan mendalami dan menelaah berbagai literatur yang sifatnya teoritis dan dipergunakan sebagai pembanding dalam pembahasan objek yang diteliti.

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data, dapat dimaknai juga sebagai kegiatan peneliti dalam upaya mengumpulkan sejumlah data lapangan yang diperlukan menguji hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan observasi terhadap dokumen laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota di Sumatera Selatan tahun anggaran 2008 sampai dengan 2013. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Wawancara dalam penelitian ini mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penyusunan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota di Sumatera Selatan periode 2008 sampai dengan 2013.

Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara tidak terstruktur karena hanya ingin mendapatkan informasi tambahan mengenai laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja kabupaten kota 2008 sampai 2013 yang sudah disusun. Seperti yang dinyatakan oleh Sugiyono (2010) wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Menurut Sugiyono (2010), observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena dan gejala -

gejala psikis dengan jalan pengamatan berdasarkan dokumen yang diperoleh. Hal ini digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun instrumen penelitian.

### Teknik Analisis Data

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu melalui metode regresi data panel. Ajija dkk (2011) mengemukakan bahwa keunggulan yang dimiliki data panel memiliki implikasi pada tidak harus dilakukan pengujian asumsi klasik dalam model data panel, karena penelitian yang menggunakan data panel memperbolehkan identifikasi parameter tertentu tanpa perlu membuat asumsi yang ketat atau tidak mengharuskan terpenuhinya semua asumsi klasik regresi linier seperti pada *Ordinary Least Square* (OLS). Berikut adalah keunggulan metode data panel seperti yang disebutkan oleh Wibisono (2005) dalam Ajija (2011), antara lain:

- a. Data panel mendasarkan diri pada observasi *cross-section* yang berulang-ulang (*time series*), sehingga model data panel cocok untuk digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*.
- b. Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, dan peningkatan derajat bebas atau derajat kebebasan (*degrees of freedom* – df), sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.
- c. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks.
- d. Data panel dapat meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Ada tiga metode yang bisa digunakan untuk bekerja dengan data

panel, yaitu sebagai berikut (Ajija dkk, 2011):

1. *Pooled least square* (PLS) atau *Common effects*. Metode ini hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* tanpa memperhatikan dimensi individu dengan mengasumsikan bahwa perilaku data antar populasi sama dalam berbagai rentang waktu. Asumsi ini jelas jauh dari realita sebenarnya, karena karakteristik populasi antar kabupaten kota dari segi kewilayahan jelas sangat berbeda.
2. *Fixed effects* (FE). Metode dengan menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Metode ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar kota kabupaten dan antar waktu, namun intersepanya berbeda antar kota kabupaten namun sama antar waktu (*time invariant*). Namun metode ini membawa kelemahan yaitu berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efisien parameter.
3. *Random effects* (RE). Memperhitungkan *error* dari data panel dengan metode *least square*. Teknik yang digunakan dalam metode *Random Effects* adalah dengan menambahkan variabel gangguan (*error terms*) yang mungkin saja akan muncul pada hubungan antar waktu dan antar kota/kabupaten. Teknik OLS tidak dapat digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien, sehingga lebih tepat untuk menggunakan Metode *Generalized Least Square* (GLS).

Untuk memilih metode data panel yang akan digunakan, dapat dilakukan berbagai teknik estimasi model regresi data panel antara lain uji *Wald* (F-Statistik) dan uji *Hausman*. Pada pengujian hipotesis penelitian dilakukan

baik secara parsial melalui uji t maupun dilakukan secara simultan melalui uji F.

Model yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$KKD_{it} = a + b_1BP_{it} + b_2BBJ_{it} + b_3BM_{it} + b_4AT_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots 2)$$

Dimana

KKD : Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

a : Nilai variabel Y<sub>1</sub> dan Y<sub>2</sub> pada saat seluruh variabel X=0

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub>, b<sub>4</sub> : Koefisien regresi (penduga bagi) BP, BBJ, BM, AT

atau kenaikan / penurunan rata-rata KKD untuk setiap kenaikan BP, BBJ, BM, AT.

BP<sub>it</sub> : Jumlah Belanja Langsung Pegawai kabupaten /kota

Provinsi Sumsel setiap periode anggaran.

BBJ<sub>it</sub> : Jumlah Belanja Langsung Barang Jasa kabupaten/kota Provinsi Sumsel setiap

periode anggaran.

BM<sub>it</sub>: Jumlah Belanja Langsung Modal kabupaten/kota Provinsi

Sumsel setiap periode anggaran.

AT<sub>it</sub>: Jumlah Asset Tetap Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi

Sumsel per tahun anggaran.

i: Kabupaten kota yang di observasi.

t: tahun yang diobservasi.

$\varepsilon_{it}$ : Komponen kesalahan random (*random error*).

**Tabel 8**  
**Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator	Ukuran
Belanja Pegawai (BP)	Belanja Tidak langsung untuk pengeluaran gaji dan tunjangan PNS serta belanja langsung untuk pengeluaran honorarium/upah PNS dan peg.kontrak karena melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.	Jumlah Gaji bulanan PNS per tahun anggaran + jumlah honorarium tidak tetap PNS dan peg.kontrak per tahun anggaran.	Rupiah
Belanja Barang dan Jasa (BBJ)	Belanja jasa kantor yang merupakan honorarium/upah Non PNS dan peg.kontrak serta honorarium PNS dan non PNS karena melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. ,belanja kursus, pelatihan, bimtek PNS, Beasiswa PNS, perawatan kendaraan bermotor, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, termasuk sewa gedung/gudang /parkir untuk menyimpan alat berat tersebut, perlengkapan peralatan kantor, dan belanja pemeliharaan.	Jumlah Belanja jasa kantor yang merupakan honorarium/upah Non PNS dan peg. kontrak serta honorarium PNS dan non PNS + ,belanja kursus + pelatihan + bimtek PNS + Beasiswa PNS + perawatan kendaraan bermotor + sewa sarana mobilitas + sewa alat berat + perlengkapan peralatan kantor, + belanja pemeliharaan pertahun anggaran.	Rupiah

Belanja Modal (BM)	Belanja langsung untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Terdiri atas belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, Asset tetap lainnya.	Jumlah belanja (tanah + peralatan dan mesin + gedung dan bangunan + jalan + irigasi dan jaringan + asset tetap lainnya) per tahun anggaran.	Rupiah
Asset Tetap Daerah (AT)	Barang yang dimiliki pemerintah daerah yang berguna untuk memperoleh manfaat finansial dan ekonomi pada masa akan datang yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik.	Jumlah ( tanah + peralatan dan mesin + gedung dan bangunan + jalan + irigasi dan jaringan + asset tetap lainnya) sampai dengan akhir tahun anggaran bersangkutan.	Rupiah
Kemampuan Keuangan Daerah (KKD)	Kemampuan Keuangan Daerah diprosikan dengan rasio Kemandirian Daerah yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.	$\frac{\text{Jml PAD/th anggaran}}{\text{Jml selrh pendpt/th anggaran}}$	Rasio dalam persentase

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemampuan keuangan daerah (KKD) sementara variabel independen adalah Belanja Pegawai (BP), Belanja Barang Jasa (BBJ), Belanja Modal (BM) dan Jumlah Aset

Tetap (AT). Gambaran atau deskriptif data kabupaten/kota yang diobservasi tersebut dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean) serta standar deviasi dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil statistik deskriptif terhadap variabel penelitian ditunjukkan pada tabel 8

**Tabel 8**  
**Statistik Deskriptif**

	KKD	BP	BBJ	BM	AT
Mean	5.031796	3.99E+11	4.76E+10	2.71E+11	2.18E+12
Maximum	27.51877	1.38E+11	2.26E+11	1.17E+12	7.74E+12
Minimum	0.552452	7.93E+10	5.22E+09	4.05E+10	9.56E+10
Std. Dev	4.088823	2.39E+11	3.80E+10	1.97E+11	1.39E+12
Observation	90	90	90	90	90

Sumber : Data diolah 2015.

Pada tabel 8 dapat dilihat bahwa dari 90 data observasi selama rentang tahun 2008-2013, nilai rata-rata KKD sebesar 5,032 dan standar deviasi sebesar 4,089. KKD adalah proksi yang digunakan untuk melihat tingkat kemandirian keuangan daerah di Sumatera Selatan. Nilai rata-rata ini menunjukkan bahwa rata-rata daerah di Sumatera Selatan masih memiliki tingkat kemandirian keuangan yang tergolong rendah sekali (kurang dari 25%). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata daerah di Sumatera Selatan masih sangat tergantung bantuan dana Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata mean menunjukkan bahwa tingkat kemampuan keuangan antara kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan kurang bervariasi atau nilai sebaran data tidak terlalu besar. Ini berarti bahwa sebagian besar kabupaten kota di Provinsi Sumatera selatan berada pada tingkat kemampuan keuangan yang sangat rendah (kurang dari 25%) hanya Kota Palembang yang berada pada tingkat kemampuan keuangan lebih dari 25% yaitu sebesar 27,5% pada tahun 2013. Sementara tingkat kemampuan keuangan minimal sebesar 0,55% yang menunjukkan tingkat kemampuan keuangan terendah dimiliki oleh Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2008.

Variabel Belanja Pegawai (BP) diprosikan memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar Rp. 399 milyar dengan standar deviasi sebesar 239 milyar. Nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan mean hal ini menunjukkan bahwa sebaran data tidak terlalu bervariasi artinya bahwa secara umum data belanja pegawai antar kota kabupaten per tahun yang sama tidak terlalu fluktuatif dan setiap tahun belanja pegawai mengalami peningkatan dengan jumlah besaran yang

tidak terlalu berbeda antar kota kabupaten. Belanja pegawai maksimal sebesar 1,38 trilyun dimiliki oleh Kota Palembang pada tahun 2013 dan Belanja pegawai minimal sebesar Rp. 79,29 Milyar dimiliki oleh Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2008.

Variabel belanja barang jasa (BBJ) memiliki nilai rata-rata sebesar 47,6 milyar, dengan standar deviasi sebesar 38 milyar. Nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan mean hal ini menunjukkan bahwa sebaran data tidak terlalu bervariasi artinya bahwa secara umum data belanja barang jasa antar kota kabupaten per tahun yang sama tidak terlalu fluktuatif dan setiap tahun belanja barang jasa mengalami peningkatan dengan jumlah besaran yang tidak terlalu berbeda antar kota kabupaten. Belanja barang jasa tertinggi atau maksimal dimiliki kota Palembang sebesar 226 milyar pada tahun 2013. Sementara belanja barang jasa terendah dimiliki kabupaten empat lawang sebesar 5,22 milyar pada tahun 2008.

Variabel belanja modal (BM) diprosikan memiliki nilai rata-rata sebesar 271 milyar. Belanja modal tertinggi sebesar 1,17 Trilyun dimiliki oleh Musi Banyuasin pada tahun 2013 . dan Belanja minimal sebesar 40,471 milyar dimiliki kota Pagaralam pada tahun 2013.

Variabel Jumlah Aset Tetap Daerah (AT) diprosikan memiliki nilai rata-rata 2,18 Trilyun. Jumlah Aset Tetap maksimal dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2013 sebesar 7,74 Trilyun, sementara jumlah aset minimal dimiliki oleh Kabupaten Empat lawang pada tahun 2008 sebesar 95,6 milyar.

### **Analisis Pembahasan**



Dalam regresi data panel terdapat tiga pendekatan metode yang dapat digunakan, yaitu *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effects* (Model Efek Tetap/MET) dan *Random Effects* (Model Efek Random / MER). Pendekatan permodelan dengan metode *OLS* biasa atau *PLS* merupakan metode yang paling sederhana, estimasi metode ini mengasumsikan setiap perusahaan memiliki *slope* dan koefisien yang sama (tidak ada perbedaan pada dimensi *cross section*) hal ini merupakan asumsi yang sangat membatasi. Dapat dikatakan model ini tidak dapat menangkap gambaran yang sebenarnya atas hubungan yang terjadi antara variabel dependen dengan variabel independennya, begitu juga dengan hubungan antara tiap individu *cross section*. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu dan diasumsikan bahwa perilaku data antar kabupaten/kota sama dalam berbagai rentang waktu. Asumsi ini jelas jauh dari realita sebenarnya, karena karakteristik antar kabupaten kota

dari segi kewilayahan jelas sangat berbeda.

Karena kelemahan pendekatan dengan metode PLS maka pendekatan yang sering digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel adalah pendekatan *FE/MET* atau pendekatan *RE/MER*. Hasil output regresi data panel melalui metode PLS, FE dan RE dapat dilihat pada lampiran 2,3 dan 4 pada penelitian ini. Guna penentuan model secara lebih tepat maka penentuan model perlu dilakukan melalui berbagai pengujian statistik atas data penelitian.

### Uji Pemilihan Metode

#### a. Uji Wald (*F Statistika*)

Menurut Nachrowi dan Usman (2006) untuk mengetahui apakah  $\alpha$  konstan pada setiap  $i$  dan  $t$  (metode *Common Effects*) ataukah berubah-ubah (Metode *Fixed Effects*) dapat dilakukan melalui uji *Wald* seperti yang terlihat pada Tabel 9 berikut ini:

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Wald**

Test Statistic	Value	Df	Probability
F-statistic	57,44656	(4, 85)	0.0000
Chi-square	229,7862	4	0.0000

Dari Tabel 9 dapat kita lihat nilai F-hit atau F-statistic adalah 57,44656, nilai tersebut dibandingkan dengan nilai F-Tabel yaitu 3.65 (sig = 0.05 ( $\alpha = 5\%$ ),  $df_1 = k - 1$  atau  $5 - 1 = 4$ , dan  $df_2 = n - k$  atau  $90 - 5 = 85$ ,  $k$  adalah jumlah variabel). Jika nilai F-hit lebih besar dibandingkan nilai F-Tabel, maka kita dapat menolak hipotesis null, yang berarti  $\alpha$  tidak konstan pada setiap  $i$  dan  $t$ , atau dengan kata lain Metode *Fixed Effects* (MET) lebih baik (Nachrowi dan Usman, 2006). Dengan

demikian pada penelitian ini penulis menggunakan metode *Fixed Effects* (MET) karena nilai F-hit > F-Tabel atau  $57,44656 > 3,65$ .

#### Uji Hausman (*Fixed Effects vs Random Effect*)

Uji Hausman bertujuan untuk membandingkan antara metode *fixed Effects* dan *random Effects*. Hasil dari pengujian ini digunakan untuk mengetahui metode mana yang sebaiknya

dipilih. Menurut Widarjono (2013) statistik *Hausman* ini mengikuti distribusi statistik *Chi Square* dengan *degree of freedom* sebanyak  $k$  dimana  $k$  adalah jumlah variabel independen. Jika kita menolak hipotesis nol yaitu ketika nilai statistik *Hausman* lebih besar dari nilai kritisnya maka metode yang tepat adalah

metode *Fixed Effects*, sebaliknya jika kita gagal menolak hipotesis nol yaitu ketika nilai statistik *Hausman* lebih kecil dari nilai kritisnya maka metode yang tepat adalah metode *Random Effects*. Hasil dari uji *Hausman Test* dapat ditunjukkan dalam Tabel 10 berikut.

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Model Menggunakan *Hausman Test***

Correlated Random Effectss - Hausman Test  
Pool: Untitled  
Test cross-section random Effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.998861	4	0.1359

Sumber : data diolah, 2015

Dari Tabel 10 dapat dilihat bahwa nilai statistik *Chi Square* sebesar 6.998861 dengan nilai *probability* sebesar 0.1359, sedangkan nilai kritis *Chi Square* dengan *degree of freedom* sebesar 4 pada  $\alpha = 5\%$  sebesar 9,49, jadi nilai statistik *Chi Square* lebih kecil daripada nilai kritis *Chi Square* atau  $6,998861 < 9.49$ . Maka hipotesis nol diterima, sehingga berdasarkan *Hausman Test* model yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect*. Hasil ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan Nachrowi dan Usman (2006) yaitu apabila jumlah data *cross section* (N) lebih besar dari jumlah data *time series* (T) maka digunakan *random Effects* dalam pengolahannya. Dimana pada penelitian ini data *cross section* berjumlah 15 kabupaten kota lebih besar dari data *times series* yang berjumlah 6 tahun.

Penentuan metode *Random* juga didasarkan pada standar error untuk masing-masing variabel dependen dan independen lebih kecil pada metode *Random Effects* dibandingkan standar error masing-masing variabel dependen dan independen pada metode *Fixed*

*Effects*. Sebagaimana tampak pada lampiran 3 yang menunjukkan hasil pengolahan data melalui metode *Fixed Effects* dan lampiran 4 yang menunjukkan hasil pengolahan data melalui metode *Random Effects*.

#### Pemilihan Model Akhir

Melalui serangkaian pengujian yaitu uji *Wald* (F Statistik) dan uji *Hausman* diperoleh metode estimasi yang lebih baik yaitu *Random Effects*. Sehingga diperoleh persamaan pada penelitian ini sebagai berikut :

$$KKD = 1,610963 + 107.000.000.000 \text{ BP} + 341.000.000.000 \text{ BBJ} - 465.000.000.000.000 \text{ BM} - 1.450.000.000.000 \text{ AT} + \varepsilon$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa konstanta sebesar 1,610963 menunjukkan jika variabel-variabel independen yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa,

Belanja Modal dan Jumlah Aset Tetap Daerah bernilai 0 (nol) maka kemampuan keuangan daerah adalah sebesar 1,610963. Kemudian koefisien masing-masing variabel independen memiliki arti bahwa setiap kenaikan Rp 1 masing-masing variabel independen tersebut dengan asumsi variabel lain dianggap tetap atau konstan, akan mengakibatkan kemampuan keuangan daerah meningkat atau menurun sesuai besaran nilai koefisiennya.

## Pengujian Hipotesis

### Pengujian Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui bahwa variabel independen yaitu belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal dan aset tetap daerah secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu kemampuan keuangan daerah. Hasil dari pengujian dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11  
Hasil Uji F (Variabel Dependen KKD)

F- Statistik	30,49841
Prob (F-Statistik)	0.000000

Sumber: Data diolah, 2015

Dari Tabel 11 dapat diketahui bahwa variabel independen yaitu belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal dan aset tetap daerah secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu kemampuan keuangan daerah (KKD). Hal ini bisa dilihat dari nilai F-hitung dan F-Tabel, dari Tabel 11 dapat dilihat bahwa nilai F-hitung adalah 30,49841 sedangkan nilai F-Tabel adalah 3,65. (sig = 0.05 ( $\alpha = 5\%$ ),  $df_1 = k - 1$  atau  $5 - 1 = 4$ , dan  $df_2 = n - k$  atau  $90 - 5 = 85$ , k adalah jumlah variabel). Jadi, F-hitung  $>$  F-Tabel atau  $30,49841 > 3,65$  dan taraf probabilitas  $< 0.05$  ( $\alpha = 5\%$ ) atau 0.000000 maka  $H_0$  ditolak itu artinya belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal dan aset tetap secara

bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah (KKD).

### Pengujian Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui bahwa variabel independen yaitu belanja pegawai (BP), belanja barang jasa (BBJ), belanja modal (BM) dan jumlah aset tetap daerah (AT) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu kemampuan keuangan daerah (KKD). Hasil dari pengujian dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12

Variabel	Nilai Koefisien	t-statistik	Sig.	Hipotesis
Konstanta	1,610963	2,260801	0.0263	-
BP	1.07E-11	4,906453	0.0000	Diterima
BBJ	3.41E-11	2,974115	0.0038	Diterima
BM	-4,65E-14	-0,023044	0.9817	Ditolak
AT	-1.14E-12	-2,307824	0.0234	Diterima

Sumber: Data diolah, 2015

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) berguna untuk mengukur seberapa besar variasi variabel independen yaitu belanja pegawai (BP), belanja barang jasa (BBJ), belanja modal (BM), jumlah asset tetap

daerah (AT) secara bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen yaitu kemampuan keuangan daerah (KKD). Hasil pengujian  $R^2$  dan adjusted  $R^2$  dapat dilihat pada table 13.

**Tabel 13**  
**Hasil Uji Koefisien determinasi ( $R^2$ ) (Variabel Dependen KKD)**

R-squared	0.589359
Adjusted R-squared	0.570035

Sumber: Data diolah, 2014

Nilai adjusted  $R^2$  antara nol dan satu. Hasil regresi model *Random Effects* terhadap variabel kemampuan keuangan daerah (KKD) menunjukkan hasil bahwa variasi variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap kemampuan keuangan daerah (KKD) sebesar 57% dan sisanya sebesar 43% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan regresi.

### Analisis Ekonomi

#### a. Belanja pegawai

Belanja pegawai berperan sebagai alat kompensasi yang diberikan kepada perangkat daerah sebagai imbalan atas

pekerjaan yang telah dilaksanakan dan juga sebagai pendorong untuk meningkatkan produktivitas kerja para perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien regresi dari belanja pegawai (BP) adalah positif, ini berarti belanja pegawai pada pemerintah kabupaten kota di provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan secara efektif yang berdampak pada terciptanya pengelolaan SDM yang baik yaitu meningkatnya produktivitas kinerja dan profesionalisme para perangkat daerah sehingga menunjang sistem tata pemerintahan yang baik (*good government*). Hal ini sangat diperlukan bagi peningkatan kualitas pelayanan

publik yang berdampak pada peningkatan penerimaan daerah dari sektor-sektor publik.

Hasil penelitian ini konsisten dengan teori *Reinventing Government* sebagaimana disampaikan Osborn dan Gaebler, yaitu berkaitan dengan strategi konsekuensi. Menurut teori ini pemerintah sebaiknya menentukan insentif-insentif yang dibangun ke dalam sistem publik dengan cara menciptakan konsekuensi-konsekuensi bagi kinerja perangkat/pegawai pemerintah. Hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan publik, sehingga berdampak pada keinginan masyarakat untuk memilih pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dan tentunya akan berdampak pada peningkatan pendapatan pemerintah daerah dari sektor layanan publik.

Tetapi penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erstelita (2015) yang menyatakan bahwa belanja pegawai (BP) berpengaruh secara negatif terhadap kemampuan keuangan daerah (KKD). Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2015). Purnomo (2015) menyatakan bahwa belanja pegawai (BP) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan PAD kota dan kabupaten Jawa Barat karena pada rentang waktu penelitian yang dilakukan banyak pegawai PNS yang telah memasuki usia tua bahkan memasuki masa pensiun ( sebesar 45,76% dari total jumlah pegawai kabupaten kota tersebut berumur di atas 45 tahun ) sehingga diduga mereka tidak produktif lagi.

#### b. Belanja Barang dan Jasa

Peraturan Menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 menjelaskan bahwa belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari

12 bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pemerintah daerah di Sumatera Selatan dalam periode penelitian ini rata-rata mengalokasikan lebih kurang 26% anggaran belanja di luar belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tak terduga untuk belanja barang dan jasa. Dengan alokasi belanja barang jasa berkaitan langsung dengan pelayanan publik sebesar 6,6% dari total anggaran belanja diluar belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tak terduga . Belanja barang jasa yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik berupa belanja jasa kantor (honorarium pegawai non PNS dan honorarium kegiatan), belanja kursus, pelatihan, bimtek dan beasiswa PNS, belanja perawatan kendaraan, belanja sewa sarana mobilitas, alat berat termasuk belanja sewa gedung/gudang untuk menyimpan alat berat tersebut, perlengkapan dan peralatan kantor, serta belanja pemeliharaan. Belanja-belanja tersebut akan meningkatkan kinerja PNS dan non PNS sebagai pelaksana pelayanan publik serta menjaga sarana-sarana publik agar tetap dalam kondisi baik.

Hasil regresi pada penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien regresi dari belanja barang dan jasa (BBJ) adalah positif, ini berarti bahwa belanja barang jasa pada pemerintah kabupaten kota di Sumatera Selatan terlaksana secara efektif yang berdampak pada peningkatan kinerja PNS dan non PNS sebagai pelaksana pelayanan publik dan menunjang terpeliharanya sarana-sarana publik, sehingga kondisi ini berdampak pada kepuasan masyarakat dan berpengaruh bagi peningkatan pendapatan daerah kabupaten kota di Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini konsisten dengan teori *Reinventing Government* yaitu berkaitan dengan strategi konsekuensi sebagaimana dijelaskan pada bagian Belanja Pegawai

di atas, serta berkaitan dengan strategi kepuasan pelanggan. Menurut teori ini organisasi-organisasi publik harus mempunyai sasaran yang harus dicapai yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Adi (2006) yang menyatakan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara belanja pembangunan daerah dengan peningkatan PAD. Belanja pembangunan tidak hanya ditujukan untuk pengembangan infrastruktur industri, tetapi juga ditujukan untuk berbagai infrastruktur jasa yang langsung terkait dengan pemberian layanan kepada publik. Upaya peningkatan PAD melalui retribusi ataupun pajak harus diimbangi dengan kesungguhan pemda untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui belanja barang dan jasa.

#### c. Belanja Modal

Hasil pengujian signifikansi belanja modal secara individual menunjukkan belanja modal tidak memberikan pengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah. Hal ini tidak sesuai dengan teori *Reinventing Government* yaitu berkaitan dengan strategi kepuasan pelanggan. Menurut teori ini bahwa Jaminan mutu pelayanan dapat diperoleh antara lain dengan memenuhi fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik. Pemenuhan fasilitas-fasilitas tersebut dapat dilakukan pemerintah daerah melalui belanja daerah terutama belanja modal. Dengan adanya pemenuhan fasilitas publik maka diharapkan adanya peningkatan layanan publik yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan pemerintah dari sektor layanan publik.

Hasil penelitian ini juga tidak konsisten dengan penelitian Wong (2004) yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai pengaruh yang nyata terhadap kenaikan

pajak daerah. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002).

Hasil penelitian ini juga tidak konsisten dengan penelitian Suhandari Sugiono (2013) yang menyatakan bahwa secara parsial Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan kabupaten kota di provinsi Jawa Timur.

Penulis berpendapat ketidak konsistenan ini disebabkan alokasi belanja modal belum diprioritaskan untuk sarana pembangunan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Belanja modal yang dilaksanakan pemerintah kabupaten kota di Sumatera Selatan kurang ditujukan untuk memperoleh aset yang dapat langsung menghasilkan PAD. Belanja modal lebih banyak ditujukan untuk pembangunan gedung-gedung perkantoran, jalan dan kendaraan dinas yang tidak berorientasi langsung kepada pelayanan publik. Seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan belanja modal yang ditujukan langsung untuk pembangunan sarana-sarana publik seperti Gedung serbaguna, pengembangan Puskesmas, Rumah Sakit, taman hiburan, hotel, restoran, penginapan dan fasilitas publik lainnya. Penyebab lainnya adalah belum meratanya pembangunan sampai ke daerah terpencil sehingga potensi PAD belum optimal. Sebagai contoh belanja modal untuk pembangunan jalan dan jembatan sebaiknya tidak hanya diperuntukkan di dalam kota tetapi juga jalan-jalan terpencil menuju lokasi pariwisata. Tentunya pembangunan sarana publik ini akan langsung berdampak pada peningkatan PAD berupa pajak dan retribusi sebagai komponen utama kemampuan keuangan daerah. Disamping itu dalam proses penyusunan anggaran



belanja modal yang melibatkan pihak eksekutif dan legislative memungkinkan terjadinya distorsi pengalokasian belanja modal sebagai dampak kecenderungan untuk memaksimalkan utilitas dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran sesuai preferensinya. Disini menunjukkan masih terjadinya masalah keagenan. Sebenarnya masalah keagenan ini dapat dihindari melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah berupa aturan bahwa belanja modal hanya dapat dianggarkan bila berkaitan langsung dengan kepentingan pelayanan publik terutama pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan publik yang secara langsung dapat menghasilkan penerimaan daerah. Dengan kebijakan ini maka akan memperkecil usulan-usulan yang sifatnya hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu dan tidak berorientasi pada penerimaan daerah.

d. Jumlah Aset Tetap Daerah

Hasil analisis regresi pada penelitian ini menunjukkan jumlah Aset Tetap berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kemampuan keuangan daerah. Arah koefisien yang negatif ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi jumlah aset tetap akan menyebabkan kemampuan keuangan daerah akan semakin rendah. Penambahan aset tetap disatu sisi memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kemampuan keuangan daerah, dimana aset tetap daerah dapat digunakan sebagai fasilitas publik yang akan menimbulkan kompensasi dari masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak atau retribusi daerah. Namun disisi lain penambahan aset tetap juga dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap kemampuan keuangan daerah, hal ini dikarenakan besarnya penambahan aset tetap akan mempengaruhi besarnya tingkat pengeluaran daerah yang kemudian dapat membebani stabilitas

keuangan daerah.

Penulis berpendapat adanya koefisien yang negatif juga sebagai dampak dari tidak efektifnya belanja modal pada pemerintah kabupaten kota di Sumatera Selatan sehingga tidak memberikan pengaruh bagi peningkatan kemampuan keuangan daerah. Sebaliknya penambahan jumlah aset tetap dalam jumlah besar pada pemerintah kabupaten kota di Sumatera Selatan akan mempengaruhi tingkat pengeluaran daerah yang dapat membebani stabilitas keuangan daerah berupa penurunan kemampuan keuangan daerah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya diperoleh kesimpulan antara lain :

- 1) Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten kota di provinsi Sumatera Selatan periode 2008-2013 dapat dilakukan melalui rasio keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian atau kemampuan keuangan daerah, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan.
- 2) Berdasarkan rasio efektifitas dengan hasil perhitungan mendekati 100% hingga lebih dari 100% bermakna bahwa pendapatan asli daerah telah direalisasikan sesuai bahkan melebihi target yang direncanakan.
- 3) Berdasarkan rasio efisiensi dengan hasil perhitungan 14,3% hingga 8,2% bermakna bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan efisien dimana biaya operasional yang dikeluarkan berupa belanja pegawai dan belanja barang jasa lebih kecil dari realisasi pendapatan asli daerah.
- 4) Berdasarkan rasio aktivitas dengan hasil perhitungan rata-rata alokasi belanja rutin adalah kurang dari 70% dan rata-rata alokasi belanja

- pembangunan lebih dari 30% bermakna bahwa pemerintah daerah tidak hanya mengalokasikan kebutuhan rutin tetapi juga telah menyiapkan dana bagi pembangunan daerahnya.
- 5) Berdasarkan rasio pertumbuhan diperoleh hasil bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan dan belanja selama tahun 2008-2013 adalah positif.
  - 6) Berbeda dengan hasil analisis rasio-rasio sebelumnya, maka pada rasio kemandirian atau kemampuan keuangan daerah diperoleh hasil rata-rata kurang dari 10%. Hal ini bermakna bahwa tingkat kemandirian kabupaten kota di provinsi Sumatera Selatan berada pada tingkat rendah sekali kurang dari 25%.
  - 7) Dari hasil analisis rasio tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan perlu ditingkatkan dalam hal kemandirian dan kemampuan keuangan daerahnya.
  - 8) Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Pegawai (BP), Belanja Barang Jasa (BBJ), Belanja Modal (BM) dan Jumlah Aset Tetap Daerah (AT) secara *simultan* berpengaruh signifikan terhadap Kemampuan Keuangan Daerah (KKD). Hal ini ditunjukkan dengan nilai F-hitung  $>$  F-Tabel atau  $30,49841 > 3,65$  dan taraf probabilitas  $0,00000 < 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ).
  - 9) Hasil pengujian menyatakan bahwa variabel belanja pegawai, belanja barang jasa, dan jumlah aset tetap daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemampuan keuangan daerah (KKD). Hal ini ditunjukkan dengan nilai t- statistik belanja pegawai, belanja barang jasa dan jumlah aset tetap daerah yang masing-masing berjumlah 4,906453, 2,974115, 2,307824 lebih besar dari nilai t-tabel yaitu 1,990. Sementara variabel belanja Modal secara parsial berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah (KKD) sebagaimana ditunjukkan dengan nilai t statistik belanja modal sebesar 0,023044 kurang dari t tabel sebesar 1,990.
  - 10) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pegawai, belanja barang jasa merupakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan rasio kemampuan keuangan daerah kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sementara jumlah aset tetap daerah baik yang berasal dari belanja modal maupun bantuan dan hibah memberikan pengaruh yang negatif terhadap kemampuan keuangan daerah, hal ini dikarenakan besarnya penambahan aset tetap akan mempengaruhi besarnya tingkat pengeluaran daerah yang kemudian dapat membebani stabilitas keuangan daerah.
  - 11) Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa belanja modal di kabupaten kota provinsi Sumatera Selatan bukan faktor utama yang dapat meningkatkan rasio kemampuan keuangan daerah. Hal ini disebabkan alokasi belanja modal belum diprioritaskan untuk sarana pembangunan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Belanja modal yang dilaksanakan pemerintah kabupaten kota di Sumatera Selatan masih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, hal ini ditunjukkan dengan persentase jumlah belanja modal pembangunan jalan, jembatan dan irigasi terhadap total belanja modal selama 2008 s/d 2013 adalah sebesar 59,65%

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan di sini adalah :

1. Bagi Pemerintah Daerah.
  - a. Pemerintah daerah kota/kabupaten Sumatera Selatan perlu memperhatikan alokasi belanja daerah khususnya Belanja Modal yang harus dikeluarkan Pemerintah Daerah dengan tetap mempertimbangkan dampak positifnya terhadap PAD, melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah yaitu kebijakan untuk belanja modal diprioritaskan bagi pembelian atau pembangunan fasilitas pelayanan publik yang dapat memberikan peningkatan PAD seperti pengembangan Puskesmas, Rumah Sakit, taman hiburan, hotel, restoran, penginapan dan fasilitas publik lainnya. Selain itu belanja modal untuk pembangunan jalan dan jembatan sebaiknya tidak hanya diperuntukkan di dalam kota tetapi juga jalan-jalan terpencil menuju lokasi pariwisata.
  - b. Perbaikan jalan pusat kota harus diawasi seoptimal mungkin sehingga memperkecil kecurangan berupa pengurangan volume ketebalan bahan pelapis jalan (aspal atau cor beton) yang akan mengakibatkan jalan mudah rusak dan senantiasa dilakukan perbaikan.
2. Bagi penelitian selanjutnya.
  - a. Karena keterbatasan penelitian ini maka pada penelitian lebih lanjut diharapkan dapat dilakukan penelitian dengan variabel independen berupa belanja pemerintah daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan variabel independen berupa pendapatan transfer baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga dapat diperoleh hasil yang jelas faktor yang mempengaruhi rasio kemampuan keuangan daerah tersebut apakah murni berasal dari pemerintah daerah ataukah dikarenakan adanya bantuan pemerintah pusat dalam bentuk pendapatan transfer.
  - b. Selain variabel belanja daerah dan karakteristik pemerintah daerah ditinjau dari jumlah aset tetap daerah, maka pada penelitian selanjutnya dapat ditambahkan variabel independen lain berupa karakteristik pemerintah daerah lainnya seperti total asset, jumlah legislatif, dan *leverage*. Sehingga dapat diketahui faktor lain yang dapat meningkatkan rasio kemampuan keuangan pemerintah kabupaten kota di Sumatera Selatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Jamil. 1998. Akselerasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Globalisasi. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JAKP)*, Volume 1 (Februari 1998).
- Ahmad Helmi. 2008. Peranan Belanja dan Penerimaan Daerah Dalam Peningkatan Perekonomian Daerah Provinsi Riau. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan volume 7 nomor 2, September 2008*.

- Aryanto, Rudi. 2011. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah volume III*.
- Budi Winarno. 2004. Implementasi Konsep Reinventing Government Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Makalah Seminar Nasional*. Dosen Fisipol UGM Yogyakarta.
- Boediono. 1999. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu ekonomi No.4. Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta BPFE Yogyakarta.
- David Effendi, Sri Wuryanti. 2011. Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan OTODA di Kabupaten Nganjuk. *Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan*. Fakultas Ekonomi UNIMUS.
- David Osborne, Peter Plastrik. 1992. *Banishing Bureaucracy*. New York: Addison Wesley Publishing Company, Inc.
- David Osborne, Ted Gaebler. 1992. *Reinventing Government : How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. New York: Penguin Book Ltd.
- Darise Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. PT.Indeks, Jakarta.
- Dirjen Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. *laporan realisasi APBD tahun 2008 – 2013 Kabupaten/Kota di Indonesia*. webside : [djpk.depkeu.go.id](http://djpk.depkeu.go.id).
- Estelita, Tria, Darwis. 2015. Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada kabupaten/Kota Povinsi Sumatera Barat. *Artikel Ilmiah*. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. 2015.
- Fajar Nugroho dan Abdul Rohman. 2013. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan PAD sebagai variabel intervening. *Diponegoro Journal of Accounting, vol I, nomor 2, tahun 2012*.
- Gujarati, D. N. 2004. *Basic Econometrics*. New York: Mc-Graw Hill.
- Halim, Abdul. 2003. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta : YUPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul, Syukriy Abdullah. 2010, Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah : (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi), *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* diakses tanggal 12 Februari 2014 pada <http://www.bppk.depkeu.go.id>.
- Halim, Abdul, Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Henry Mujianto. 2010. Peningkatan kinerja Pelayanan Publik, *Makalah*. FE UI, Jakarta.
- [Http://www://keuda.Kemendagri.go.id/Artikel/detail/41-belanja-modal-pemda-harus-capai-30%](http://www://keuda.Kemendagri.go.id/Artikel/detail/41-belanja-modal-pemda-harus-capai-30%).
- Ika, Lusiana, Darsono. 2013. Pengaruh Alokasi Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di pulau Jawa Pada tahun 2011, *Jurnal Profita:*

- Kajian ilmu Akuntansi Vol 1 Nomor 8.*
- Indra Bastian, Gatot Soepriyanto. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Indrawati, Budi, 2007. Peranan Pertumbuhan Ekonomi di Era Orde Baru dan Era Reformasi. *Jurnal Kajian Ilmiah*, Lembaga Penelitian Ubhara Jaya, Vol.8, Nomor 1, Tahun 2007: 365-382.
- Indriantoro, Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian untuk Akuntansi dan Manajemen Edisi Pertama*. Yogyakarta : BPF
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.
- Koswara, E. 2001. *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta : Yayasan Pariba.
- Lavelock, Cristopler. 1988. *Managing Service: Marketing, Operation and Human Resources*. London : Prantice Hall Inc.
- Mangkoesoebroto,G. 1993. *Ekonomi Publik*. Edisi Ketiga. BPF Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah* (<http://www.ekonomi-rakyat.org/edisi 4/ artikel 3.htm>).
- Media Kusumawardani. 2012. Pengaruh size, kemakmuran, ukuran legislatif, leverage terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Univesitas Negeri Semarang.
- Mentari, Y.S., dkk. Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2008-2012), *Jurnal Administrasi publik (JAP)*, Vol.2, Nomor 2, Hal.236-242.
- Mustikarini, Widya Astuti, Fitriasari, Debby. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Belanja Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi XV*: Banjarmasin.
- Nachrowi, D.N,dan Usman, Hardius. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Nikmah,A.R.,dkk. 2014. Analisis Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara (Studi pada Kota Manado dan Kota Bitung Tahun 2008-2012). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 14 Nomor 3*, Oktober 2014.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.



- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2002 tentang *Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendayagunaan Agaratur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.
- Pemerintah Kota Palembang, *Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Kota Palembang, tahun 2008 sampai dengan 2013*.
- Priyo Hari Adi. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah Studi Pada Kabupaten dan Kota Sejava Bali. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*, Universitas Kristen.
- Ramasamy, Bala, Darryl Ong and Matthew. 2005. Firm size, ownership and performance in the Malaysian Palm oil Industry. *Asian Academy of management journal of Accounting and Financial*.
- Rizky dan Suryo. 2009. Pengaruh PAD dan Belanja Pembangunan terhadap rasio kemandirian dan pertumbuhan Ekonomi. *Konferensi Penelitian Keuangan Sektor Publik II*.
- Shochrul R. Ajija dkk. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Kedua Belas. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suhandari, Sugiono. 2013. Pengaruh Moderasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Hubungan Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah. *Tesis*. Universitas Negeri Surabaya.
- Swaramarinda, Darma Rika dan Susi Indriani. 2011. Pengaruh Pengeluaran Konsumsi dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Econo Sains*, Volume IX, Nomor 2, Agustus 2011: 95-105. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
- Syachrani, A.N., 2013. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dan Tingkat Ketergantungan Terhadap Pemerintah Pusat. *Tesis*. Program



- Magister Keuangan Daerah  
Universitas Hasanuddin.
- Tjiptono, Fandy. 2004. *Manajemen Jasa*.  
Cetakan Kedua, Yogyakarta :  
Penerbit Andi.
- Tommy, P.H. 2013. Pengaruh Pengeluaran  
Pemerintah Terhadap  
Pertumbuhan Ekonomi  
Kabupaten Kota di Provinsi Jawa  
Tengah  
Tahun 2007-2011, *Economic  
Development Analysis Journal 2*:  
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/cdaj>.
- Tungki Ariwibowo. 2013. Pengaruh Dana  
Perimbangan dan Belanja Daerah  
Terhadap Kinerja Keuangan  
Daerah Dengan Pendapatan Asli  
Daerah sebagai Variabel  
Moderasi. *Tesis*. Fakultas  
Ekonomi Universitas Slamet  
Riyadi Surakarta.
- Wong, John D. 2004, The Fiscal Impact  
of Economic Growth and  
Development on Local  
Government Capacity, *Journal of  
Public Budgeting, Accounting  
and Financial Management*, Fall.  
16.3. Hal : 413 – 423.
- Widarjono, Agus 2013. *Ekonometrika  
Pengantar dan Aplikasinya  
Disertai Panduan Eviews*. UPP  
STIM YKPN.

